

**VIRAL ACCOUNTABILITY DAN KULTUR DEMOKRASI BARU: STUDI
KASUS KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA DIGITAL DALAM KASUS
BIMA LAMPUNG**

YUMNA RISANG HAYUNA

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi digital telah merekonstruksi lanskap partisipasi politik di era modern, membuka ruang baru bagi warga negara untuk mengawasi dan menginterupsi kekuasaan. Media sosial, sebagai infrastruktur komunikasi digital, memungkinkan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah menyebar secara cepat dan luas, sering kali melalui mekanisme viralitas. Fenomena “No Viral, No Justice” mencerminkan bahwa akuntabilitas institusi negara kini semakin ditentukan oleh intensitas sorotan publik di ruang digital, meskipun respons yang dihasilkan cenderung bersifat reaktif dan tidak lahir dari sistem yang deliberatif. Dengan menggunakan pendekatan Digital Speech dan Democratic Culture oleh Jack Balkin, penelitian ini menempatkan kebebasan berekspresi bukan sekadar sebagai hak individu, melainkan sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat dan partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa ruang digital memiliki potensi sebagai kanal demokrasi baru yang memperkuat kontrol warga terhadap kekuasaan, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti dominasi algoritma, kriminalisasi ekspresi, serta regulasi yang represif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kontrol demokratis yang ideal, negara perlu menjamin perlindungan terhadap ekspresi warga, merevisi regulasi bermasalah seperti UU ITE, serta memperkuat literasi digital publik sebagai modal penting dalam demokratisasi informasi. Meski belum sepenuhnya ideal, ruang digital telah mendorong lahirnya kultur demokrasi baru yang lebih terbuka, horizontal, dan responsif terhadap suara warga.

Kata kunci: Kebebasan berekspresi digital, Demokrasi digital, Kultur demokrasi baru

**VIRAL ACCOUNTABILITY AND NEW DEMOCRACY CULTURE: A CASE
STUDY OF FREEDOM OF EXPRESSION IN DIGITAL MEDIA IN THE
CASE OF BIMA LAMPUNG**

YUMNA RISANG HAYUNA

ABSTRACT

Digital freedom of expression has reconstructed the landscape of political participation in the modern era, opening up new spaces for citizens to monitor and interrupt power. Social media, as a digital communication infrastructure, allows aspirations and criticisms of the government to spread quickly and widely, often through viral mechanisms. The phenomenon of “No Viral, No Justice” reflects that the accountability of state institutions is now increasingly determined by the intensity of public attention in the digital space, although the resulting response tends to be reactive and does not arise from a deliberative system. Using Jack Balkin Digital Speech dan Democratic Culture, this study positions freedom of expression not merely as an individual right, but as the main foundation of a healthy and participatory democracy. The findings show that digital space has the potential to be a new democratic channel that strengthens citizen control over power, but is still faced with challenges such as algorithm dominance, criminalization of expression, and repressive regulations. Therefore, to realize ideal democratic control, the state needs to guarantee protection for citizen expression, revise problematic regulations such as the ITE Law, and strengthen public digital literacy as an important capital in the democratization of information. Although not yet completely ideal, digital space has encouraged the birth of a new democratic culture that is more open, horizontal, and responsive to the voices of citizens.

Keywords: *Digital freedom of expression, Digital democracy, New democratic culture*